

Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi serta Pengaruh Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar

*Nur Idwan Tutu¹

¹Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: nuridwantutu@students.undip.ac.id

*Penulis korespondensi, Masuk: 11 Agt. 2022, Revisi: 07 Sep. 2022, Diterima: 30 Sep. 2022

ABSTRAK: Informasi tentang peta potensi ekonomi daerah sangat diperlukan untuk melakukan perencanaan dan strategi peningkatan ekonomi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peta potensi daerah sektor apa saja yang akan menjadi unggulan pada kota Makassar sehingga perlu dikembangkan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Metode yang digunakan adalah analisis pertumbuhan ekonomi adalah Location Quotient (LQ) analisis dan Shift-Share analisis yang dipadukan dengan analisis penduduk dengan menggunakan proyeksi Trendline untuk menentukan proyeksi penduduk di masa yang akan datang. Data yang digunakan adalah data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan sektor yang paling potensial untuk Kota Makassar adalah bidang pengadaan air dan pengelolaan persampahan dengan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2023 sebesar 1.355.046 jiwa. Beberapa potensi lain yang merupakan sektor basis pada kota Makassar antara lain: kegiatan sosial serta jasa lainnya, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa perusahaan, jasa asuransi dan keuangan, komunikasi dan informasi, makan minum dan penyediaan akomodasi, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, pengolahan sampah, pengadaan air, serta industri pengolahan. Diharapkan kedepan konsep yang diusulkan dari penelitian ini dapat diterapkan oleh pihak pemerintah, pihak pengembang maupun investor untuk menentukan kebijakan dan strategi bisnis dengan peluang keberhasilan yang tinggi dan memberikan dampak positif dalam jangka waktu panjang.

Kata kunci: Kota Makassar, Location quotient, Pendapatan asli daerah, Sektor unggulan, Shift-share.

ABSTRACT: The information regarding the economic potential map of a region is crucial for conducting regional planning and economic development strategies. The aim of this research is to identify the potential sectors in the city of Makassar that can become leading industries, requiring development to maximize the local revenue. The methods used in this study are the Location Quotient (LQ) analysis and Shift-Share analysis, combined with population analysis using Trendline projections to determine future population projections. The data used in this study is the Gross Regional Domestic Product (GRDP) data for the period 2016-2020. The research findings indicate that the most potential sector for Makassar is in the field of water supply and waste management, with a projected population of 1,355,046 people in the year 2023. Several other potentials that serve as the city's economic basis include social activities and other services, healthcare services, education services, company services, insurance and financial services, communication and information services, food and accommodation services, wholesale and retail trade, construction, waste processing, water supply, and manufacturing industries. It is hoped that in the future, the proposed concept from this research can be applied by the government, developers, and investors to determine policies and business strategies with a high probability of success, leading to positive long-term impacts.

Keywords: Makassar City, Location Quotient, Local revenue, Leading sectors, Shift-Share.

1. PENDAHULUAN

Sukirno dalam Khairad [1] mengemukakan bahwa “Pembangunan merupakan suatu deretan aksi perubahan menuju pada arah yang lebih maju, perubahan juga dapat diartikan sebagai susunan cara

dan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadaan yang sedang bergerak naik atau kondisi yang dipenuhi oleh semangat menuju ke arah kematangan”. Di Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, saat ini diarahkan pada pembangunan dalam bidang

ekonomi dikarenakan pembangunan di bidang yang lain didorong dengan adanya ekspansi ekonomi. Prinsip otonomi daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang merupakan bagian integral dari pembangunan di daerah yang sudah berlangsung saat ini dalam melakukan kegiatan pembangunan. Otonomi daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk memberi kebebasan pada daerah dalam urusan serta beban yang ada di daerah. Sementara kebijakan strategis Nasional diharapkan dilaksanakan oleh pemerintah pusat sehingga dapat lebih fokus. Pada lain sisi, tahapan-tahapan pemberdayaan yang memberi pengaruh lebih akan dilalui oleh setiap daerah otonomi, dan ini menjadi dasar dari adanya otonomi daerah. UU (Undang-Undang) Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah di dalamnya mengatur tentang implementasi otonomi daerah.

Permintaan barang serta jasa yang bersumber di luar daerah memiliki kaitan yang cukup erat dengan elemen penentu yang utama dalam ekspansi suatu daerah pada sektor ekonomi, hal ini dikenal sebagai teori basis ekonomi [2, 3]. Sumber daya lokal, seperti tenaga kerja serta bahan baku yang akan di ekspor dapat menjadi hasil kekayaan daerah serta pembentukan lapangan kerja digunakan dalam pertumbuhan industri [4].

Dalam merangsang terciptanya lapangan pekerjaan serta pembangunan ekonomi perkotaan, melakukan identifikasi terhadap kluster dengan potensi tinggi adalah suatu hal yang penting untuk menentukan tempat dalam mengatur pusat dukungan serta menganggarkan investasi [5]. Middleton [6], mengemukakan alasan bahwa tidak semua kluster membutuhkan dukungan atau faktor yang sama untuk dapat berkembang.

Sumber APBD Kota Makassar masih bergantung dengan pemerintah pusat dibanding PAD (Pendapatan Asli Daerah), sehingga diperlukan beberapa upaya dalam menghadirkan potensi yang ada pada kawasan tersebut yang dapat membuat pendapatan asli daerah menjadi meningkat sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pendapatan asli suatu daerah bersumber dari produk retribusi daerah, produk pajak daerah, produk perusahaan yang dimiliki oleh daerah dan lainnya yang merupakan penerimaan sah daerah. Sumber penerimaan tersebut akan menjadi beberapa sumber pembiayaan dalam penyelenggara pemerintahan dan peningkatan serta pemerataan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan daerah.

Tingginya pertumbuhan ekonomi serta keberlanjutan merupakan suatu kondisi atau keharusan bagi pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan eskalasi kesejahteraan. Tingkat aktivitas ekonomi yang meningkat, dan atau menjadi lebih tinggi

dari tahun sebelumnya apabila diperbandingkan merupakan suatu perekonomian yang dapat dikatakan mengalami perkembangan atau tumbuh. Muryawan [7] berpendapat bahwa “Perkembangan ekonomi dari sisi pengamatan sektor ekonomi dapat digambarkan dengan adanya Produk Domestik Bruto yang mengalami pertumbuhan”. Ini menjadi variabel atau alat ukur dalam menentukan tingkatan ekonomi suatu negara apabila telah dijalankan dengan sesuai dengan kaidah yang benar.



Gambar 1. Peta Kota Makassar sebagai wilayah studi (Sumber: Sumber: Bappeda Kota Makassar, 2022)

Tabel 1. Data Tingkat Kependudukan Kota Makassar

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	59.666	56.288	115.954
5 - 9	58.384	55.563	113.947
10 - 14	67.536	63.032	130.568
15 - 19	66.916	62.968	129.884
20 - 24	67.119	63.547	130.666
25 - 29	65.260	63.778	129.038
30 - 34	62.215	60.961	123.176
35 - 39	53.552	54.882	108.434
40 - 44	47.582	49.974	97.556
45 - 49	40.304	44.326	84.630
50 - 54	35.227	39.551	74.778
55 - 59	30.646	33.347	63.993
60 - 64	22.329	24.471	46.800
65 - 70	15.552	18.356	33.908
70 - 74	9.149	11.613	20.762
+75	7.620	12.070	19.690
Jumlah	709.057	714.727	1.423.784

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Setiap orang yang tinggal dan berdomisili pada wilayah teritorial Republik Indonesia dalam kurung waktu enam bulan dan lebih atau orang yang tujuannya menetap meskipun kurang dari enam bulan dapat dikatakan sebagai penduduk menurut Badan Pusat Statistik. Siwu [8] mengatakan bahwa “dalam perkembangan ekonomi, penduduk mempunyai peranan; hal ini dapat dilihat dari sisi permintaan

dan dari sisi penawaran”. Oleh sebab itu, tingkat pertumbuhan penduduk yang berkembang dengan cepat tidak selalu menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dapat terlaksana apabila kapasitas yang tinggi dalam menghasilkan serta menyerap faktor produksi dimiliki oleh setiap penduduk.

Tabel 2. Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Makassar serta Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 dan Tahun 2020

SEKTOR/SUB SEKTOR	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	745,15	840,92	88.344,95	109.495,51
Pertambangan dan Penggalian	1,42	-	19.564,26	23.444,29
Industri Pengolahan	26.407,78	31.925,72	53.017,47	6.464,40
Pengadaan Listrik dan Gas	36,49	51,90	219,86	322,65
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	263,06	323,62	394,00	510,09
Konstruksi	21.920,50	33.290,65	47.621,18	72.415,57
Perdagangan Besar dan Eceran	23.899,36	34.983,12	50.058,29	72.982,96
Transportasi dan Pergudangan	3.273,81	3.928,66	16.170,46	15.508,34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.878,59	3.292,66	4.991,42	6.433,99
Informasi dan Komunikasi	11.447,60	17.944,24	17.573,80	28.309,67
Jasa Keuangan dan Asuransi	7.949,62	10.592,32	14.363,09	18.914,04
Real Estat	5.308,90	6.425,25	14.879,21	19.214,27
Jasa Perusahaan	1.490,58	1.957,20	1.652,58	2.176,61
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.309,67	6.193,19	16.841,81	23.749,39
Jasa Pendidikan	11.208,09	16.337,46	19.130,90	28.238,15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.502,58	5.813,68	7.329,54	11.635,10
“Jasa Lainnya”	3.402,18	4.432,41	4.956,08	6.480,52
JUMLAH	128.045,38	178.333,00	377.108,90	446.295,55

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Preferensi kebijakan yang segera dijalankan adalah mengembangkan potensi ekonomi dari bidang unggulan yang telah memberi kontribusi paling besar dalam kemajuan suatu daerah. Oleh sebab itu, informasi tentang potensi yang terdapat pada suatu daerah amat penting dalam mendukung kebijakan pengembangan ekonomi di tingkat daerah. Di Kota Makassar, terdapat kekurangan informasi tentang beberapa potensi yang dapat dikumpulkan dan mungkin untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan pengembangan ekonomi pada tingkat daerah, sehingga dibutuhkan suatu analisis mengenai pola pertumbuhan ekonomi serta pengaruh jumlah penduduk di Kota Makassar perlu dilaksanakan dalam melakukan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di waktu mendatang.

Iriyena [9] berpendapat bahwa “Faktor seperti infrastruktur, teknologi serta tenaga kerja merupakan salah satu dasar yang mempengaruhi adanya perkembangan ekonomi suatu wilayah”. Dalam studi ini, terbatas pada peningkatan produktivitas/produksi di dalam suatu wilayah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi karena perkembangan ekonomi di dalam suatu wilayah akan meningkat apabila pencapaian efisiensinya tinggi, dalam hal ini Kota Makassar.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan mengetahui potensi daerah sektor apa saja yang akan menjadi unggulan pada kota Makassar.

2. METODE

2.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Objek yang akan diteliti pada studi ini adalah Kota Makassar. Data sekunder yang terdiri dari data pertumbuhan ekonomi “Produk Domestik Regional Bruto” digunakan dalam studi ini. “hasil dari beberapa kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam area domestik baik itu barang ataupun jasa yang tidak memperhatikan asal dari faktor produksinya apakah sumbernya dari dan dimiliki penduduk tersebut diartikan sebagai Produk Domestik Bruto (PRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)”. PDRB berdasarkan lapangan usaha dengan harga konstan pada tahun 2021 kota Makassar serta Provinsi Sulawesi Selatan 2016-2020 digunakan pada penelitian ini. PDRB ini menggunakan satuan dalam juta rupiah.

Setiap orang yang tinggal dan berdomisili pada wilayah teritorial Republik Indonesia dalam kurung waktu enam bulan dan lebih atau orang yang tujuannya menetap meskipun kurang dari enam bulan disebut sebagai penduduk (Statistik Indonesia). Penggunaan data besarnya jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2013-2020 digunakan pada penelitian ini, dengan satuan jiwa sebagai variabel penduduk.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode dengan studi kepustakaan digunakan dalam studi ini pada saat pengumpulan data. Beberapa bahan bacaan yang memiliki hubungan dengan studi ini dikumpulkan menjadi cara dalam penerapan metode ini. Buku-buku yang diterbitkan Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemerintah Kota Makassar melalui BPS (Badan Pusat Statistik) serta hasil pencarian dari media online berupa jurnal, artikel, dan beberapa buku lainnya.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Data berupa kejadian dari waktu ke waktu dengan menggunakan periode 2016-2020 yang merupakan data sekunder digunakan pada studi ini. Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan lapangan usaha dengan pertimbangan harga konstan pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar merupakan data yang dipergunakan dalam studi ini. Dengan mempergunakan data ini, akan mendukung cara analisis dengan menggunakan alat analisis berupa "Location Quotient" (LQ). Beberapa dari data ini telah disediakan dan telah dilakukan pemrosesan oleh beberapa pihak sebagai hasil dari suatu penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya. BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Makassar dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari sumber data tersebut [10].

2.4. Metode Analisis

2.4.1. Analisis Location Quotient (LQ)

Alat analisis berupa Location Quotient (LQ) digunakan untuk memberi perbandingan seberapa besar kontribusi suatu wilayah dalam hal ini kabupaten/kota terhadap besarnya fungsi dari sektor tersebut di wilayah/daerah referensi (Provinsi Sulawesi Selatan) [11]. Aktivitas perekonomian dalam suatu wilayah dapat digolongkan dalam dua bagian melalui Analisis Location Quotient yaitu: (1) Aktivitas di bidang ekonomi yang memberikan pelayanan pada wilayah itu saja ataupun dari luar wilayah yang bersangkutan. Bidang ekonomi dengan gambaran seperti ini disebut sebagai bidang basis (ekonomi potensial); (2) Aktivitas di bidang ekonomi yang memberikan pelayanan pasar khusus untuk wilayah itu saja disebut sebagai sektor non basis (potensial).

Dalam menentukan versi ekonomi basis merupakan tahapan awal dalam memahami bagian dari kegiatan yang akan menjadi dorongan pertumbuhan maka menggunakan analisis Location Quotient adalah pendekatan dari banyak analisis yang dapat dipergunakan. Tingkatan kekhususan kegiatan ekonomi atau konsentrasi relatif melalui suatu pendekatan perbandingan dapat diukur dengan Location Quotient. Cara dari Location

Quotient dilakukan dalam membahas keadaan suatu perekonomian yang mengarah pada pengenalan kekhususan aktivitas perekonomian atau mengukur tingkat kedalaman suatu kegiatan perekonomian guna memperoleh suatu gambaran dalam menetapkan sektor unggulan menjadi sektor utama aktivitas perekonomian. Fokus pada dimensi tenaga kerja serta pendapatan sering menjadi pembahasan pada Location Quotient.

Dalam memberi perbandingan kemampuan beberapa sektor pada suatu daerah maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$LQ = \frac{ps}{\frac{pl}{Ps}} \quad (1)$$

Dimana: LQ = Location Quotient, ps = Kesempatan Kerja / Penerapan bidang I, pada tingkat Kota Makassar, pl = Kesempatan Kerja / Penerapan total, pada tingkat Kota Makassar, Ps = Kesempatan Kerja / Penerapan bidang I, pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Pl = Kesempatan Kerja / Penerapan total I, pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan,

Patokan dalam Pengukuran Location Quotient adalah: (1) Location Quotient < 1 berarti bidang i pada suatu daerah kota/kabupaten lebih kecil dibandingkan bidang yang serupa pada Provinsi Sulawesi Selatan. Bidang tersebut tidak menjadi sektor basis; (2) Location Quotient > 1 berarti bidang i di kota/kabupaten lebih besar atau sama dari bidang yang serupa di Provinsi Sulawesi Selatan. Bidang itu dapat menjadi sektor basis serta dapat pula mengeksport hasil output sektor i keluar dari wilayah tersebut [12].

2.4.2. Analisis Shift-Share

Ulasan dengan shift-share adalah alat tradisional untuk perbandingan antar wilayah, mengukur dan mengevaluasi kinerja sektoral. Berbagai macam aplikasi telah muncul sejak diperkenalkannya metodologi ini. Penggunaannya secara luas dijelaskan oleh kesederhanaannya, persyaratan data sederhana, dan fakta bahwa hasilnya relatif mudah untuk dinilai dan diinterpretasikan [13]. Analisis shift-share menguraikan perubahan pekerjaan (pendapatan) di wilayah tertentu menjadi tiga komponen: komponen pangsa nasional, komponen pergeseran sektoral, dan komponen pergeseran nasional.

Analisis dengan Shift-Share adalah cara yang digunakan dalam membuat ulasan tentang perubahan bentuk ekonomi suatu wilayah apabila dilakukan perbandingan dengan perekonomian wilayah nasional [14]. Alat analisis menggunakan Shift-Share diperuntukkan untuk menganalisis terjadinya perubahan dari kegiatan ekonomi dalam kurung waktu tertentu. Keluaran dengan menggunakan analisis ini

bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang perkembangan suatu bidang dalam suatu daerah dibandingkan dengan bidang lainnya.

Adapun data tentang kinerja perekonomian berisi tiga bagian yang saling berhubungan satu sama lain dalam analisis ini yaitu: (1) Komponen pangsa nasional mencoba mengukur pertumbuhan atau penurunan lapangan kerja (atau pendapatan) yang akan terjadi di wilayah tersebut jika lapangan kerja (atau pendapatan) tumbuh pada tingkat yang sama persis dengan rata-rata nasional [15]. Oleh karena itu jika wilayah tersebut tumbuh pada tingkat yang sama dengan rata-rata nasional, maka wilayah tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif. Menurut model yang digunakan oleh Mo, dkk. [15], Komponen pangsa nasional dihitung dengan mengalihkan pekerjaan (atau pendapatan) tahun dasar regional di setiap sektor dengan rata-rata tingkat pertumbuhan lapangan kerja (atau pendapatan) nasional dan kemudian menjumlahkan produknya. Angka-angka yang dihasilkan menggambarkan jumlah lapangan kerja (atau pendapatan) yang baru diciptakan yang disebabkan oleh tren ekonomi nasional dan tidak ada yang lain; (2) Komponen kedua yaitu komponen pergeseran sektoral yang mengaitkan tingkat pertumbuhan diferensial antara wilayah yang bersangkutan dan negara dengan kekuatan dan kelemahan keseluruhan dari sektor industri tertentu. Idealnya bahwa Sebagian besar dari pekerjaan (atau pendapatan) daerah harus terkonsentrasi pada industri dimana mengalami pertumbuhan lebih cepat serta melalui cara yang sama, persentase yang lebih kecil dari pekerjaan (atau pendapatan) suatu daerah harus berada di sektor-sektor yang tumbuh lebih lambat. Perekonomian daerah efek dari bauran industri dihitung dengan mengalikan lapangan kerja (atau pendapatan) lokal di sektor tertentu dengan perbedaan tingkat pertumbuhan nasional untuk sektor tersebut dan tingkat pertumbuhan untuk seluruh perekonomian. (3) Komponen pergeseran regional (disebut juga “efek kompetitif regional”) menunjukkan bahwa wilayah yang diteliti lebih atau kurang efisien (kompetitif) dalam mengamankan bagian yang lebih besar dari pekerjaan (atau pendapatan) daripada mitranya (negara). Komponen pergeseran regional dihitung dengan mengalikan lapangan kerja (atau pendapatan) regional di bidang tertentu dan perbedaan tingkat pertumbuhan bidang yang dimaksud secara menyeluruh pada tingkat nasional dan regional [13].

$$PS = KPP + KPPW \quad (2)$$

Dimana: PS = kesempatan kerja, KPP =

perubahan kesempatan kerja/penerapan suatu daerah yang dikarenakan oleh komposisi beberapa sektor industri pada daerah tersebut, $KPPW$ = perubahan kesempatan kerja atau penerapan suatu wilayah yang dikarenakan oleh keunggulan komparatif wilayah tersebut.

Kriteria Pengukuran PS terdiri dari: $PS < 1$ artinya bidang tersebut adalah bidang yang perkembangannya lamban/mundur; dan $PS > 1$ artinya bidang tersebut adalah bidang yang perkembangannya progresif/maju. Teknik yang relatif murah serta cepat dalam melakukan analisis pertumbuhan atau penurunan suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu adalah dengan memakai analisis Shift-Share [16].

2.4.3. Analisis Klassen

Menurut Amalia [17] mengatakan bahwa “Metode Klassen adalah pengumpulan suatu sektor dengan memperhatikan kontribusi serta perkembangan sektor tertentu dibandingkan dengan total PDRB pada suatu daerah”. Sektor dibagi ke dalam 4 kategori pada saat menggunakan analisis tipologi Klassen yaitu sektor prima, sektor tertekan namun maju (sektor potensial), sektor berkembang dan sektor terbelakang.

Laju pertumbuhan sumbangan sektoral terhadap PDRB menjadi dasar menentukan suatu sektor masuk ke dalam kategori yang mana dari empat kategori tersebut [18].

2.4.4. Analisis Penduduk

Analisis data penduduk mempunyai hubungan dalam upaya menguraikan karakteristik serta gerak penduduk dengan cara mengidentifikasi seberapa besar jumlah penduduk dan perkembangannya, persebaran penduduk, sektor yang memberi pengaruh dalam perubahan besarnya jumlah penduduk serta bentuk penduduk. Dengan menggunakan analisis penduduk, hal perlu diperhatikan adalah bagaimana keistimewaan penduduk pada waktu lalu, saat ini serta rentang waktu mendatang sebagai landasan dalam melakukan perencanaan wilayah/kota.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Location Quotient (LQ)

Hasil analisis dengan menggunakan Location Quotient (LQ) digunakan agar mengetahui secara detail sektor atau kegiatan ekonomi tertentu pada daerah perencanaan [19]. Studi ini menggunakan variabel yaitu faktor PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) daerah Kota Makassar dan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sebagai PDRB acuan untuk mendapatkan sektor basis wilayah perencanaan yang akan berpotensi

mendukung pengembangan wilayah. Di bawah ini merupakan tabel yang memperlihatkan secara keseluruhan bidang di Kota Makassar pada tahun 2016 dan tahun 2020.

Tabel 3. Hasil perhitungan dengan menggunakan Analisis Metode Location Quotient (LQ) Tahun 2016

SEKTOR/SUB SEKTOR	KABUPATEN ps/pl Total	PROVINSI Ps/Pl Total	LQ TAHUN 2016 (ps/pl)/(Ps/Pl) Total
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,0058	0,2343	0,0248
Pertambangan dan Penggalian	0,0000	0,0519	0,0002
Industri Pengolahan	0,2062	0,1406	1,4669
Pengadaan Listrik dan Gas	0,0003	0,0006	0,4888
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	0,0021	0,0010	1,9663
Konstruksi	0,1712	0,1263	1,3556
Perdagangan Besar dan Eceran	0,1866	0,1327	1,4061
Transportasi dan Pergudangan	0,0256	0,0429	0,5962
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,0225	0,0132	1,6985
Informasi dan Komunikasi	0,0894	0,0466	1,9184
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,0621	0,0381	1,6301
Real Estat	0,0415	0,0395	1,0508
Jasa Perusahaan	0,0116	0,0044	2,6564
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,0337	0,0447	0,7536
Jasa Pendidikan	0,0875	0,0507	1,7254
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,0274	0,0194	1,4073
Jasa Lainnya	0,0266	0,0131	2,0217
JUMLAH	1,0000	1,0000	1

Tabel 4. Hasil perhitungan dengan menggunakan Analisis Metode Location Quotient (LQ) Tahun 2020

SEKTOR/SUB SEKTOR	KABUPATEN ps/pl Total	PROVINSI Ps/Pl Total	LQ TAHUN 2020 (ps/pl)/(Ps/Pl) Total
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,0047	0,2453	0,0192
Pertambangan dan Penggalian	-	0,0525	0
Industri Pengolahan	0,1790	0,0145	12,3596
Pengadaan Listrik dan Gas	0,0003	0,0007	0,40256
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	0,0018	0,0011	1,5877
Konstruksi	0,1867	0,1623	1,1505
Perdagangan Besar dan Eceran	0,1962	0,1635	1,1996
Transportasi dan Pergudangan	0,0220	0,0347	0,63396
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,0185	0,0144	1,28076
Informasi dan Komunikasi	0,1006	0,0634	1,5863
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,0594	0,0424	1,4015
Real Estat	0,0360	0,0431	0,8368
Jasa Perusahaan	0,0110	0,0049	2,2503
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,0347	0,0532	0,6526
Jasa Pendidikan	0,0916	0,0633	1,4479
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,0326	0,0261	1,2504
Jasa Lainnya	0,0249	0,0145	1,7116
JUMLAH	1,0000	1,0000	1

Tabel 5. Hasil perhitungan menggunakan Analisis dengan Shift-Share pada Kota Makassar

SEKTOR/SUB SEKTOR	ri yit/yio	Ri Yit/Yio	Ra Yi/Yo	PN Ra - 1	PP Ri - Ra	PPW ri - Ra	PS PP + PPW
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,1285	1,2394	1,1835	0,1835	0,0559	-0,0549	0,0010
Pertambangan dan Penggalian	-	1,1983	1,1835	0,1835	0,0149	-1,1835	-1,1686
Industri Pengolahan	1,2090	0,1219	1,1835	0,1835	-1,0615	0,0255	-1,0361
Pengadaan Listrik dan Gas	1,4223	1,4675	1,1835	0,1835	0,2841	0,2388	0,5229
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	1,2302	1,2946	1,1835	0,1835	0,1112	0,0467	0,1579
Konstruksi	1,5187	1,5207	1,1835	0,1835	0,3372	0,3352	0,6724
Perdagangan Besar dan Eceran	1,4638	1,4580	1,1835	0,1835	0,2745	0,2803	0,5548
Transportasi dan Pergudangan	1,2000	0,9591	1,1835	0,1835	-0,2244	0,0166	-0,2079
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,1438	1,2890	1,1835	0,1835	0,1055	-0,0396	0,0659
Informasi dan Komunikasi	1,5675	1,6109	1,1835	0,1835	0,4274	0,3840	0,8115
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,3324	1,3169	1,1835	0,1835	0,1334	0,1490	0,2823
Real Estat	1,2103	1,2914	1,1835	0,1835	0,1079	0,0268	0,1347
Jasa Perusahaan	1,3130	1,3171	1,1835	0,1835	0,1336	0,1296	0,2632
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,4370	1,4101	1,1835	0,1835	0,2267	0,2536	0,4803
Jasa Pendidikan	1,4576	1,4760	1,1835	0,1835	0,2926	0,2742	0,5668
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,6598	1,5874	1,1835	0,1835	0,4040	0,4764	0,8803
Jasa Lainnya	1,3028	1,3076	1,1835	0,1835	0,1241	0,1193	0,2435
JUMLAH	1,3927	1,1835					

(Sumber: Badan Pusat Statistik2022)

Dapat dilihat pada tabel, terdapat 11 sektor/sub sektor dari perhitungan menggunakan metode analisis Location Quotient yang merupakan sektor basis pada kota Makassar antara lain yaitu: kegiatan sosial serta jasa lainnya, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa perusahaan, jasa asuransi dan keuangan, komunikasi dan informasi, makan minum dan penyediaan akomodasi, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, pengolahan sampah, pengadaan air, serta industri pengolahan. Sementara itu, jaminan sosial wajib, pertahanan, administrasi pemerintahan, real estat, pergudangan dan transportasi, pengadaan listrik dan gas, perikanan, kehutanan serta pertanian adalah sektor yang tidak menjadi basis di Kota Makassar. Dengan membandingkan hasil analisis Location Quotient di atas maka terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada sektor industri pengolahan. Hal ini menandakan adanya peningkatan produksi yang cukup tinggi pada bagian ini, bukan hanya mampu dalam memenuhi setiap kebutuhan yang ada di wilayahnya tetapi juga dapat dibawa keluar wilayah.

3.2. Analisis Shift-Share

Hasil analisis dengan menggunakan shift-share yang terdapat pada Tabel 5 mempunyai nilai elemen bernilai positif yang untuk semua sektor yang ada di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan nasional diyakini sebagai pengaruh positif dalam gambaran beberapa sektor tersebut. Dalam hal ini yang memberikan pengaruh yang positif dalam perkembangan sektor pembangunan yang terjadi di Kota Makassar adalah pengaruh dari kebijakan umum secara nasional. Berbagai jenis keputusan akan fiskal dan moneter, tingkat inflasi, subsidi, sistem perpajakan, dan kurs

merupakan kebijakan umum yang memberikan dampak positif secara nasional terhadap pertumbuhan pada semua sektor.

Dari tabel hasil perhitungan analisis dengan shift-share tabel 5 maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pergudangan dan transportasi, industri pengolahan dan sektor pertambangan adalah sektor/sub sektor yang mengalami perkembangan secara mundur/lamban di Kota Makassar. Sedangkan sektor yang mengalami progresif atau maju adalah jasa lainnya, kegiatan sosial dan jasa kesehatan, jasa pendidikan, jaminan sosial dan pertahanan, administrasi pemerintah, jasa perusahaan, real estat, asuransi dan jasa keuangan, komunikasi dan informasi, perdagangan eceran dan besar, konstruksi, pengelolaan persampahan, pengadaan air, pengadaan gas dan listrik, perikanan dan kehutanan, serta pertanian.

Selain sektor/sub sektor yang mengalami maju dan mundur, dari analisis shift-share terdapat beberapa sektor yang merupakan sektor unggulan pada Kota Makassar. Adapun sektor yang menjadi unggulan pada Kota Makassar yaitu, sektor pelayanan jasa lainnya, sektor kegiatan sosial dan kesehatan, sektor jasa perusahaan, sektor asuransi dan jasa keuangan, sektor komunikasi dan informasi, sektor perdagangan eceran dan besar, sektor konstruksi, pengelolaan persampahan dan sektor pengadaan air.

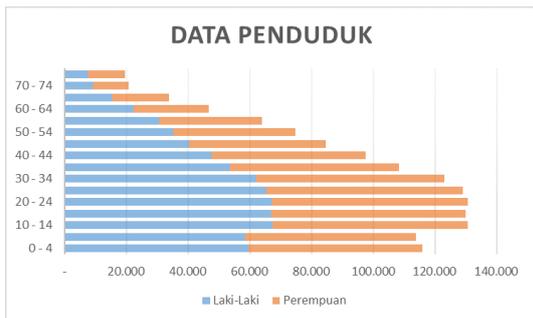
3.3. Analisis Penduduk

Untuk analisis kependudukan dilakukan dengan menggunakan metode proyeksi trendline untuk memproyeksi penduduk pada masa mendatang yaitu dengan kecenderungan terjadinya penambahan atau terjadi pengurangan dalam setiap tahunnya [20].

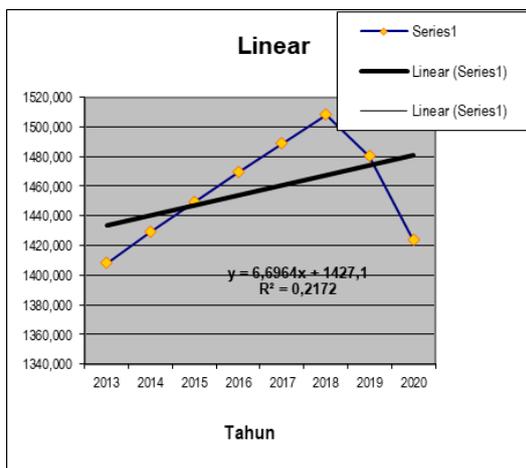
Dengan selesainya proses pengambilan data dengan sumber dari Badan Pusat Statistik maka data yang diperoleh sebagai bahan dalam pembahasan dan analisis yaitu dengan data sekunder berupa:

Tabel 6. Hasil estimasi pertumbuhan penduduk pada Kota Makassar

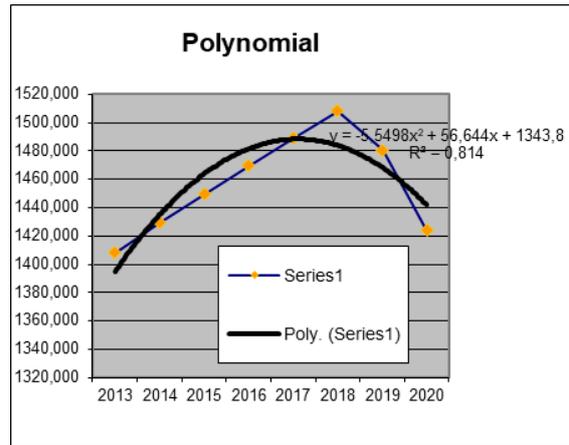
Year	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	Linear	Logarithmic	Polynomial
(X)	(Y)			
2013	1408,072			
2014	1429,242			
2015	1449,401			
2016	1469,601			
2017	1489,011			
2018	1508,154	1460,582	1466,025	1488,275
2019	1480,480	1467,278	1471,680	1483,871
2020	1423,877	1473,975	1476,462	1468,368
2021		1480,671	1480,604	1441,765
2022		1487,368	1484,258	1404,062
2023		1494,064	1487,526	1355,260



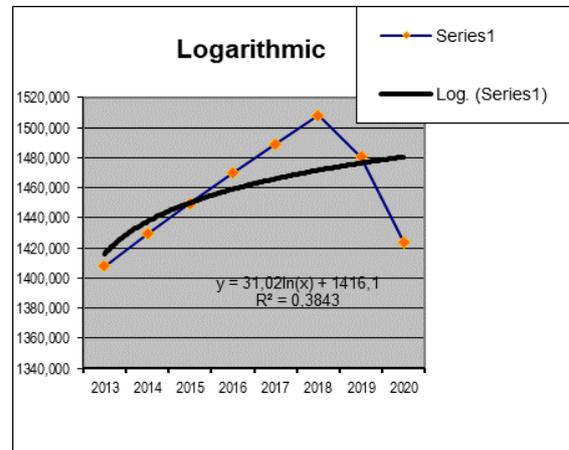
Gambar 2. Jumlah Penduduk dihipung berdasarkan Umur Tahun 2020 (Sumber: Badan Pusat Statistik)



Gambar 3. Grafik Trendline Linear



Gambar 4. Grafik Trendline Polynomial



Gambar 5. Grafik Trendline Logarithmic

Analisis trendline menggunakan beberapa bentuk grafik antara lain linear, logarithmic dan polynomial sehingga dari setiap bentuk grafik tersebut diperoleh angka R square serta persamaan. Grafik polynomial merupakan hasil dari analisis dengan nilai R square mendekati angka 1 atau yang paling besar, Gambar 3-5.

4. KESIMPULAN

Makalah ini menguraikan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar berdasarkan komponen-komponen dan menganalisis pola pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk Kota Makassar dengan menerapkan analisis Shift-Share, Location Quotient dan analisis kependudukan dengan menggunakan metode trendline.

Penggunaan analisis dengan Location Quotient dan analisis dengan shift-share pada analisis pertumbuhan ekonomi menghasilkan sektor-sektor unggulan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Makassar. Sektor-sektor unggulan itu meliputi: (1) bidang pengadaan air, pengelolaan persampahan, (2)

bidang konstruksi, (3) bidang perdagangan eceran dan besar, (4) bidang informasi dan komunikasi, (5) bidang jasa keuangan dan asuransi, (6) bidang jasa perusahaan, (7) bidang jasa pendidikan, (8) bidang kesehatan dan kegiatan sosial, serta (9) bidang jasa lainnya. Selain itu pertumbuhan penduduk di Kota Makassar yang mengalami penurunan namun tidak begitu signifikan sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor ekonomi, dimana para pekerja rata-rata berada atau bekerja pada kesembilan sektor tersebut.

Melalui regresi polynomial trendline maka diperkirakan pertumbuhan penduduk di Kota Makassar akan mengalami penurunan menjadi 1.355.046 pada tahun 2023 apabila hal tersebut dikaitkan dengan metode analisis kependudukan. Sehubungan dengan hal ini, maka dalam menentukan suatu kebijakan dapat dijadikan pertimbangan dari hasil analisis yang

telah digunakan tersebut sehingga saat menentukan fokus pengembangan Kota Makassar utamanya pada sektor yang mengalami kemunduran serta lamban dan sektor dengan kategori bukan basis, sehingga dalam mengambil kebijakan akan lebih tepat sasaran sebagai bentuk upaya percepatan perubahan status.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk upaya optimalisasi sektor-sektor unggulan di Kota Makassar sebagai persiapan dalam memberikan kualitas hidup yang lebih layak bagi warga Kota Makassar terutama untuk usia produktif 19-29 tahun yang akan menjadi proyeksi dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengatasi kelemahan pada penelitian ini yang menggunakan PDRB Kota Makassar dengan release tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Khairad, M. Noer, and M. Mahdi, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sentra Produksi Subsektor Tanaman Pangan di Provinsi Sumatera Barat," *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, vol. 2, no. 2, pp. 171–184, 2018.
- [2] J. Kirchherr, D. Reike, and M. Hekkert, "Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions," *Resources, conservation and recycling*, vol. 127, pp. 221–232, 2017.
- [3] K. R. Jumiyanti, "Analisis location quotient dalam penentuan sektor basis dan non basis di Kabupaten Gorontalo," *Gorontalo Development Review*, vol. 1, no. 1, pp. 29–43, 2018.
- [4] B. Sutejo, M. K. Amin, and S. Sari, "Perencana Pengembangan Industri Di Propinsi Kalimantan Timur Dengan Mengintegrasikan Metode Location Quotient Dan Analisis Bertingkat (Analytical Hierartycal Process)," *Opsi*, vol. 11, no. 1, pp. 35–48, 2018.
- [5] Z. Garanti, A. Zvirbule-Berzina, and T. Yesilada, "Cluster concept in policy planning documents: the cases of Latvia and Northern Cyprus," *Business: Theory and Practice*, vol. 15, no. 2, pp. 129–139, 2014.
- [6] L. Middleton, H. Hall, and R. Raeside, "Applications and applicability of Social Cognitive Theory in information science research," *Journal of Librarianship and Information Science*, vol. 51, no. 4, pp. 927–937, 2019.
- [7] S. M. Muryawan and M. Sukarsa, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, vol. 5, no. 2016, pp. 229–252, 2016.
- [8] H. F. D. Siwu, "Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, vol. 18, no. 6, 2019.
- [9] P. Iriyena, A. T. Naukoko, and H. F. D. Siwu, "Analisis pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten kaimana 2007-2017," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 19, no. 02, 2019.
- [10] BPS, *Produk Domestik Regional Bruto atas Dasra Harga Konstan 2020 Kota Makassar Tahun 2016-2021, Makassar: Badan Pusat Statistik*, 2021.
- [11] D. Manullang, A. Rusgiyono, and B. Warsito, "Analysis of aquaculture leading commodities in Central Java using Location Quotient and Shift Share methods," in *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1217, no. 1. IOP Publishing, 2019, p. 012096.
- [12] I. Ibrahim, "Analisis potensi sektor ekonomi dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi (studi empiris pada kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016)," *Gorontalo development review*, vol. 1, no. 1, pp. 44–58, 2018.
- [13] T. Dogru and E. Sirakaya-Turk, "Engines of tourism's growth: An examination of efficacy of shift-share regression analysis in South Carolina," *Tourism Management*, vol. 58, pp. 205–214, 2017.
- [14] E. Pasaribu, M. Anitasari, R. Gunawan, R. A. Ekaputr, and N. T. Putri, "ANALISIS SHIFT SHARE PADA TRANSFORMASI SEKTOR PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN WILAYAH DI BENGKULU,"

- Jurnal Ekonomi-Qu*, vol. 10, no. 2, pp. 129–144, 2020.
- [15] S. W. Mo, K. B. Lee, Y. J. Lee, and H. G. Park, “Analysis of import changes through shift-share, location quotient and BCG techniques: Gwangyang Port in Asia,” *The Asian Journal of Shipping and Logistics*, vol. 36, no. 3, pp. 145–156, 2020.
- [16] D. Lv, H. Gao, and Y. Zhang, “Rural economic development based on shift-share analysis in a developing country: a case study in Heilongjiang Province, China,” *Sustainability*, vol. 13, no. 4, p. 1969, 2021.
- [17] F. Amalia, R. Sinaga, R. F. Soeyatno, D. Silitonga, A. Solikin, A. K. Hubbansyah, R. T. Siregar, D. Maulina, R. Kusumaningrum, N. F. Sahamony *et al.*, *Ekonomi pembangunan*. Penerbit Widina, 2022.
- [18] M. Basuki and F. N. Mujiraharjo, “Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient,” *Jurnal Sains, Teknologi dan Industri*, vol. 15, no. 1, pp. 52–60, 2017.
- [19] F. Niyimbanira, M. E. Eggink, and R. Nishimwe-Niyimbanira, “The identification of the key sub-industries among coastal metropolitan cities of South Africa: An application of the location quotient technique,” *International Journal of Economics and Finance Studies*, vol. 12, no. 1, pp. 50–70, 2020.
- [20] A. N. Rusli, A. Roza, and A. M. Rusli, “Analisis Sektor Basis dan Sektor Non Basis dalam Upaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan di Kota Padang,” *Jurnal Saintis*, vol. 21, no. 01, pp. 45–52, 2021.



© 2022 by the authors. Licensee LINEARS, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC ND) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>).